



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: V (lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dengan	: Forum Rektor Indonesia.
Hari/Tanggal	: Rabu, 15 Juni 2016.
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, SE,M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Tuti Retnowati, B,Sc/Kasubag Rapat Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Untuk memberikan masukan tentang pembukaan program baru; 2. Pembukaan Program Pendidikan Kedokteran; 3. Menunjuk LPTK sebagai penyelenggara PPG; 4. Dampak BOPTN terhadap kenaikan UKT; 5. Problematika beasiswa bidikmisi dan beasiswa lainnya yang ada di Perguruan Tinggi; 6. SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri penerimaan mahasiswa baru tahun 2016; 7. Sarpras dan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan 8. Lain-lain.
Hadir	: 28 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir dari FRI	: Ketua Forum Rektor Indonesia beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh Ferdiansyah, SE,M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali pengantar ketua rapat, dilanjutkan pemaparan dari Forum Rektor Indonesia serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dari Forum Rektor Indonesia. Adapun paparan dan aspirasi yang disampaikan dalam rapat ini menjadi bahan yang tidak terpisahkan. (Bahan terlampir).

B. Forum Rektor Indonesia mengusulkan dan menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI sebagai berikut:

1. Masukan Tentang Pembukaan Program Baru.

- a. Kemenristekdikti RI perlu memiliki data base (data pokok) program studi dan membatasi pembukaan prodi baru yang sudah jenuh serta disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan daerah.

- b. Kemenristekdikti RI seharusnya dalam memberikan mandat langsung disertai izin operasional dan semestinya otomatis terakreditasi B sebab dengan akreditasi C merugikan mahasiswa tidak bisa mengikuti seleksi CPNS atau pekerjaan lain.
2. **Pembukaan Program Pendidikan Kedokteran;**
 - a. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan **moratorium prodi baru kedokteran** mengingat lulusan cukup banyak yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
 - b. Kemenristekdikti RI perlu membuat kebijakan melalui Permen untuk **membatasi kuota penerimaan** mahasiswa baru kedokteran (karena sekarang surat edaran Dirjen Dikti berpotensi untuk dilanggar)
 - c. Pemerintah perlu mengupayakan **pembinaan** khusus pada prodi kedokteran dengan **akreditasi C**, agar dalam kurun 3-4 tahun dapat terakreditasi B dan perlu program distribusi dokter agar merata.
 3. **Penunjukan LPTK Sebagai Penyelenggara PPG;**
 - a. Mengantisipasi tingginya pensiun Guru kedepan maka Program Profesi Guru (PPG) perlu ada secara berkelanjutan, untuk itu perlu segera penunjukan pelaksanaan PPG yang didasarkan atas kredibilitas LPTK dengan akreditasi prodi minimal B, serta perlu regulasi pengangkatan guru CPNS harus telah tersertifikasi PPG atau PLPG.
 - b. LPTK mengalami kesulitan dengan pemisahan Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud RI karena keluaran dari LPTK berkaitan dengan Guru selain itu Kemenristekdikti RI harus mengendalikan Konsorsium PPG.
 4. **Dampak BOPTN Terhadap Kenaikan UKT;**
 - a. Besaran alokasi BOPTN **tidak menutupi kekurangan** penerimaan PNBPN sebelum berlakunya pola UKT, kedepan perlu kejelasan dasar pengalokasian BOPTN agar dapat menutupi BKT sehingga UKT tidak perlu naik, dan penggunaan BOPTN dapat se-fleksibel anggaran PNBPN.
 - b. Alokasi anggaran **rupiah murni non-BOPTN** tahun 2016 untuk kegiatan bidang kemahasiswaan dihilangkan, sehingga untuk mengganti alokasi kegiatan bidang kemahasiswaan mengambil alokasi BOPTN.
 - c. Kenaikan alokasi BOPTN dari tahun ke tahun **tidak signifikan** (bahkan ada sejumlah PTN dengan BOPTN yang turun).
 5. **Problematika Seputar Beasiswa Bidikmisi, Dan Beasiswa Lainnya Yang Ada Di Perguruan Tinggi;**
 - a. Penentuan besaran beasiswa Bidikmisi hendaknya mempertimbangkan **indeks kemahalan** daerah dan kuotanya jangan mengalami penurunan termasuk beasiswa PPA yang ditiadakan pada tahun 2016 telah menimbulkan potensi sosial perlu tetap ada.
 - b. Perlu **perpanjangan** beasiswa Bidikmisi selama **1 semester** bagi mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan studi tepat waktu (8 semester) dan untuk bidang studi keguruan hendaknya satu paket dengan PPG (seperti prodi Pendidikan Dokter).

6. **SNMPTN, SBMPTN, dan Jalur Mandiri Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2016-2017;**

- a. Proporsi SNMPTN dapat diturunkan menjadi **30%**, untuk memberikan kelonggaran bagi SBMPTN, SNMPTN **digratiskan pendaftaran**, kecuali bagi yang mampu dan diperlukan **kecermatan Rektor** dalam menentukan kelulusan agar bermanfaat untuk program **afirmatif** yang sepenuhnya diserahkan kepada Rektor.
- b. Proporsi minimal SBMPTN perlu dinaikkan **menjadi 40%** (sebelumnya hanya 30%), karena pola ini memiliki objektivitas yang lebih tinggi, peserta dikenakan biaya pendaftaran kecuali calon mahasiswa yang kurang mampu, dan SBMPTN dapat dilakukan melalui **Paper Based Test (PBT)** dan **Computer Based Test (CBT)**.
- c. Proporsi Seleksi Mandiri cukup memberikan kelonggaran bagi PTN, memberikan **otonomi akademik** kepada pimpinan PTN, dapat menggunakan metode non-tes dan tes, dan memberikan peluang dan dukungan untuk implementasi kerja sama dan afirmasi serta berdasarkan Permen No 22 Tahun 2015 Pasal 9 dibolehkan perguruan tinggi memungut uang pangkal dan atau pungutan lain selain UKT sesuai dengan kemampuan (Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)).

7. **Sarpras Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan**

- a. Mendesak Kemenristekdikti RI agar melakukan pengelolaan anggaran fungsi pendidikan dengan baik dan cermat mengingat pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
- b. Investasi **perluasan lahan** dan **pengadaan bangunan** untuk kegiatan akademik sangatlah penting, namun kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Saat ini Perguruan Tinggi sangat memerlukan **Asrama mahasiswa** dan **sekolah laboratorium di LPTK, Rumah Sakit Pendidikan, peralatan laboratorium/bengkel/studio** guna menjamin keberlanjutan peningkatan mutu Pendidikan Tinggi.

C. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Forum Rektor Indonesia, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Kemenristekdikti RI).

III. **PENUTUP.**

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB.

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E.,M.M